



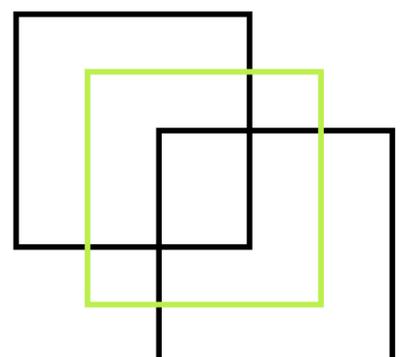
Dinas TPHP

Rencana Strategis

Tahun 2024-2026 (Pemutakhiran)



Dibuat Oleh :
Dinas TPHP Kab. Magetan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 ini dapat diselesaikan menurut perundangan yang berlaku. Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 ini menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan 2024 - 2026 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja OPD, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Segala kekurangan dalam Perubahan Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Magetan, 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA PERKEBUNAN
DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN



Ir. USWATUL CHASANA, MMA

Pembiņa Utama Muda

NIP. 19660904 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD.....	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang.....	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Permasalahan Pelayanan PD	43
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 45	
3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi.....	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	53
3.5. Isu-Isu Strategis.....	57
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	59
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	59
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	65
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGATAN	67
6.1. Rencana Program	67
6.2. Rencana Kegiatan.....	67
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN	92
7.1. Rencana Program	92
BAB 8 PENUTUP.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang	19
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon	19
Tabel 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.4	Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	20
Tabel 2.5	Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	21
Tabel 2.6	Keragaan Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	21
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	30
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	34
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan	49
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kab Magetan 2024-2026	51
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Pertanian	53
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur	55
Tabel 3.5	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magetan	59
Tabel 3.6	. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magetan	59
Tabel 3.7	Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan terhadap RTRW Kabupaten Magetan	60
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	66
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	68
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-202	73
Tabel T-C.28.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TAHUN 2024-2026	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	18
Gambar II.2	Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magetan, tahun 2018 – 2022	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya. Adanya perubahan Perubahan Renstra ini merupakan bentuk tindak lanjut Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk melakukan pemuktakhiran sub kegiatan pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Surat Edaran Bupati Magetan nomor 050/403.202/2022 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 . Perubahan Perubahan Renstra akan menjadi pedoman, arah, dan tujuan yang jelas bagi usulan perencanaan program dan kegiatan untuk masa lima tahun mendatang. Menteri dalam Negeri melalui instruksi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru telah mengeluarkan arahan untuk melakukan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 050/1651/403.202/2023 telah menetapkan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Perubahan Renstra 2024-2026 ini kondisi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magetan pada khususnya masih berjuang untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat dampak Pandemi Covid-19. Karena itu kebijakan pembangunan pertanian di Magetan masih fokus pada pembangkitan ekonomi masyarakat. Prioritas program dan kegiatan serta pendanaan akan diprioritaskan pada percepatan pemulihan dan kebangkitan sektor pertanian, penanggulangan kemiskinan serta pengendalian laju inflasi, dimana sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor basis di Kabupaten Magetan.

Perubahan Renstra disusun sebagai pedoman bagi penetapan yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan pembangunan. Perubahan Renstra juga berfungsi sebagai acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam merencanakan program dan kegiatan tahunan selama 3 tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026. Perubahan Renstra ini akan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan pertanian dan perkembangan kapasitas pengelolaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dalam hal ini, RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026. Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 3 (tiga) tahunan yang berkesinambungan.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam perencanaan strategis, maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah pada masa transisi pemerintahan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu ada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan disusun dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga dapat mendukung atas sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPD Daerah. Wewenang dinas dalam bidang pertanian menjadi sangat strategis karena menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan daerah yang harus segera dipulihkan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendukung Tujuan I yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, untuk sasarnya, Perubahan Renstra dinas merujuk pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan yang salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Persentase PDRB Sektor Pertanian. Maka, orientasi dan fokus target kinerja dinas adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 seri E);
 - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
- 24) Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
- 25) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
- 26) Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan tahunan dinas, pedoman bagi sekretariat, dan bidang-bidang dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah dan dinas Tahun 2024 – 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 3 (tiga) tahun mendatang
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan.
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 3 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun tiga tahunan ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi mitra perangkat daerah, antara lain Bappeda sebagai perencana, kelompok tani sebagai binaan dinas.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan relevansi dan konsistensi antar Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran perangkat daerah harus memiliki dukungan terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah.

BAB V. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran tahun 2024-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang nomenklatur OPD yang baru maka nama OPD berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah OPD dengan Tipe B dan mengampu urusan pertanian. Adanya perubahan Nomenklatur OPD belum diikuti dengan adanya Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja. Oleh karena itu pada Perubahan Renstra ini masih menggunakan SOTK yang lama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan terdiri dari:

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pertanian.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

C. BIDANG SARANA PRASARANA

Bidang sarana prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- 2) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian;
- 4) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- 5) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 6) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG TANAMAN PANGAN

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan pengolahan di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

Fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 3) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 5) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 7) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 8) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 9) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- 10) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- 11) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

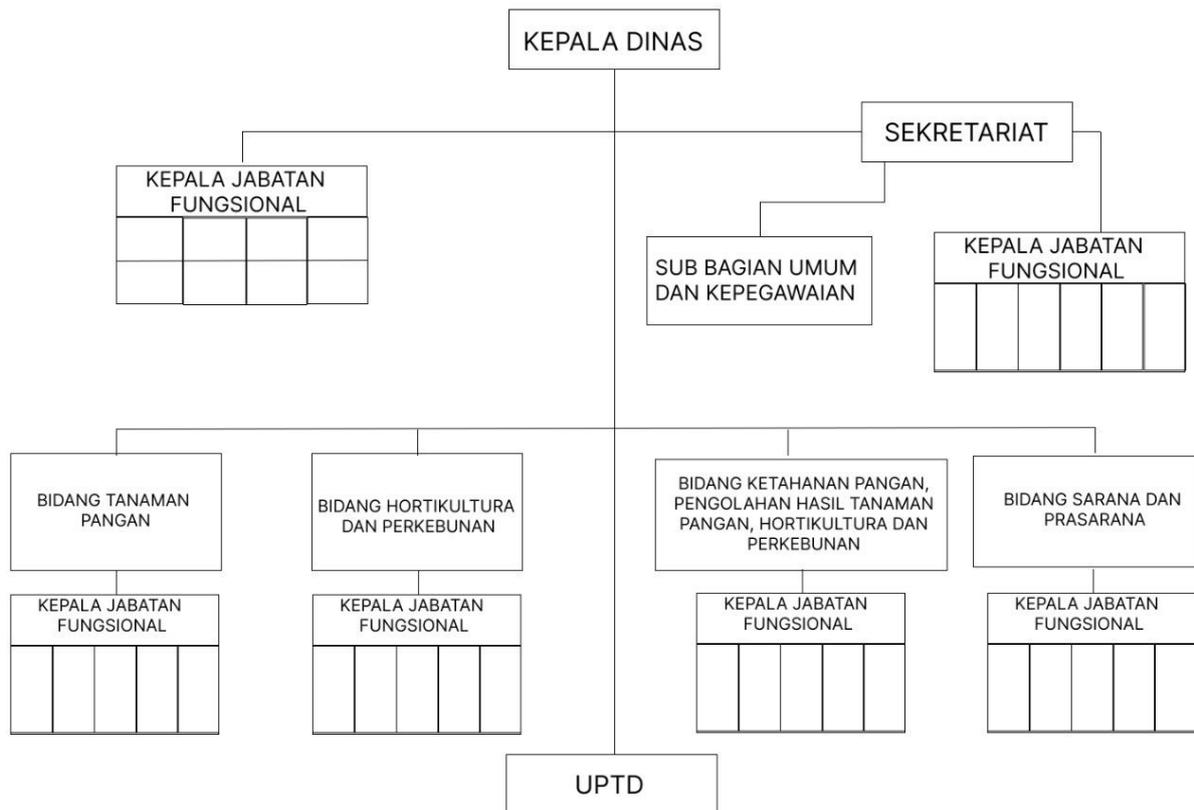
G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul serta pengelolaan aset Pemerintah Daerah untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan



Jumlah personel di ASN di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebanyak 144 orang terdiri dari 81 PNS dan 63 PPPK.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan memiliki 178 pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	5
4.	IV/b	6
5.	IV/a	5
6.	III/d	27
7.	III/c	5
8.	III/b	7
9.	III/a	2
10.	II/d	5
11.	II/c	4
12.	II/b	1
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
18.	Tenaga PPPK	63
19.	Tenaga Outsourcing	48
	Jumlah	178

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th.2022

Tabel 2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	4
4.	Kepala UPTD	IVa	1
5.	Kasubag	IV.a	1
6.	KTU	IV.b	2
7.	Staf/ Pelaksana	-	17
8.	JFT		53
	Jumlah		81

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th. 2022

Tabel 2.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	5
2.	Strata 1 (S1)	75
3.	Sarjana Muda (D3)	8
4.	SLTA	29
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	117

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th. 2022

Tabel 2.4. Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	1
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	8
	Jumlah	11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th. 2022

2.2.2. Asset / Modal

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah memiliki asset/modal diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Total Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 66.552.251.141 Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5. Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

NO	JENIS	JUMLAH (Rp)
1	Tanah	8.123.985.840
2	Golongan peralatan dan mesin	10.586.525.610
3	Golongan Gedung dan bangunan	33.464.459.040
4	Golongan jaringan, irigasi dan	18.537.078.120

	jaringan	
5	Aset tetap lainnya	75.235.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	4.515.000

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab. Magetan th. 2022

Tabel 2.6. Keragaan Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan

No.	Jenis	Unit	Asal	Kondisi
1	Sawah ditanami padi	11	APBD	Baik
2	Sawah ditanami tebu	2	APBD	Baik
3	Sawah ditanami sayuran	5	APBD	Baik
4	Tanah ditanami tanaman luar pekarangan	1	APBD	Baik
5	Tanah bangunan pasar	1	APBD	Baik
6	Tanah bangunan kantor pemerintah	2	APBD	Baik
7	Tanah sawah	1	APBD	Baik
8	Tanah tegalan	2	APBD	Baik
9	Tanah kebun	3	APBD	Baik
10	Tanah kosong	1	APBD	Baik
11	Tanah Kebun pembibitan	1	APBD	Baik
12	Tanah waduk	9	APBD	Baik
13	Tanah lapangan	1	APBD	Baik
14	Dump Truck	1	APBD	Rusak ringan
15	Genset	3	APBD	Rusak ringan
16	Stationary Water Pump	1	APBD	Baik
17	Sumersible Pump	15	APBD	Baik & Rusak ringan
18	Pompa Tangan	1	APBD	Rusak ringan
19	Station Wagon	3	APBD	Baik & Rusak ringan
20	Pick Up	2	APBD	Baik & Rusak ringan
21	Sepeda Motor	94	APBD	Baik & Rusak ringan

22	Gerobak Dorong	7	APBD	Baik & Rusak ringan
23	Troli	1	APBD	Baik
24	Mesin Gergaji Logam	3	APBD	Baik & Rusak ringan
25	Mesin Bor	2	APBD	Baik
26	Grating Generator Unit	1	APBD	Baik
27	Alat Ukur Kadar Air	2	APBD	Baik
28	Timbangan Cepat	22	APBD	Baik & Rusak ringan
29	Bajak Muara	1	APBD	Baik
30	Tractor Tangan	5	APBD	Baik & Rusak ringan
31	Chain Saw	3	APBD	Baik
32	MIST Blower	2	APBD	Baik
33	Alat Pengumpul/Penyedot Padi	7	APBD	Baik & Rusak ringan
34	Container	1	APBD	Baik
35	Lemari Penyimpan	2	APBD	Baik
36	Alat Penggilingan Padi	5	APBD	Baik & Rusak ringan
37	Alat Pencacah Hijauan	2	APBD	Baik
38	Alat Pengayak Janggolan	1	APBD	Baik
39	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	5	APBD	Baik & Rusak ringan
40	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	24	APBD	Baik & Rusak ringan
41	Penyemprot Tangan (Hand Srayer)	120	APBD	Baik & Rusak ringan
42	Ani-ani	2	APBD	Baik
43	Alat Perontok Mesin (Power thersar)	2	APBD	Baik & Rusak ringan
44	Alat Pengering (Dreyer)	1	APBD	Baik
45	Rak-rak penyimpanan	2	APBD	Baik
46	Lemari Penyimpanan	2	APBD	Baik
47	Mesin Ketik Manual	1	APBD	Baik

	Portable (11-13)			
48	Lemari Besi/Metal	60	APBD	Baik & Rusak ringan
49	Rak Besi/Metal	8	APBD	Baik & Rusak ringan
50	Filling Besi/Metal	37	APBD	Baik & Rusak ringan
51	Brankas	1	APBD	Baik
52	Lemari Kaca	9	APBD	Baik & Rusak ringan
53	Rak susun	5	APBD	Baik & Rusak ringan
54	Papan Visuil	1	APBD	Baik
55	Alat Penghancur Kertas	1	APBD	Baik
56	Papan Tulis	1	APBD	Baik
57	Jaringan CCTV	2	APBD	Baik
58	Teralis	1	APBD	Baik
59	LCD Proyektor	31	APBD	Baik & Rusak ringan
60	Tripod Screen LCD Projector	1	APBD	Baik
61	Etalase	2	APBD	Baik
62	Lemari Kayu	5	APBD	Baik & Rusak ringan
63	Meja Kayu/Rotan	159	APBD	Baik & Rusak ringan
64	Kursi Besi / Metal	148	APBD	Baik & Rusak ringan
65	Meja Rapat	13	APBD	Baik & Rusak ringan
66	Meja Resepsion	1	APBD	Baik
67	Kursi Rapat	141	APBD	Baik & Rusak ringan
68	Kursi Tamu	11	APBD	Baik & Rusak ringan
69	Kursi Biasa	51	APBD	Baik & Rusak ringan
70	Tenda	6	APBD	Baik

71	Sofa	3	APBD	Baik & Rusak ringan
72	Mesin Potong Rumput	12	APBD	Baik & Rusak ringan
73	Lemari Es	8	APBD	Baik & Rusak ringan
74	AC Unit	20	APBD	Baik & Rusak ringan
75	Kipas Angin	5	APBD	Baik & Rusak ringan
76	Kompor Gas	4	APBD	Baik & Rusak ringan
77	Alat Dapur Lainnya	1	APBD	Baik
78	Oven Listrik	1	APBD	Baik
79	Tabung Gas	4	APBD	Baik
80	Alat Pemanas	2	APBD	Baik
81	Televisi	21	APBD	Baik & Rusak ringan
82	Sound System	24	APBD	Baik & Rusak ringan
83	Wireless	21	APBD	Baik & Rusak ringan
84	Megaphone	23	APBD	Baik & Rusak ringan
85	Stabilisator	1	APBD	Baik
86	Camera Video	18	APBD	Baik
87	Timbangan Barang	5	APBD	Baik
88	Tangga Alumunium	8	APBD	Baik & Rusak ringan
89	Dispencer	10	APBD	Baik & Rusak ringan
90	Handy Cam	4	APBD	Rusak ringan
91	Gordyn/Tirai	2	APBD	Rusak ringan
92	Tandon Air (Bak Penyimpan Air)	1	APBD	Baik
93	Alat pemotong rumput	3	APBD	Baik & Rusak ringan
94	Alat Pemadam/Portable	1	APBD	Baik

95	P.C. Unit	21	APBD	Baik & Rusak ringan
96	Lap Top	77	APBD	Baik & Rusak ringan
97	Note Book	2	APBD	Rusak ringan
98	Finger print	1	APBD	Rusak ringan
99	Printer	40	APBD	Baik & Rusak ringan
100	Scanner	5	APBD	Baik & Rusak ringan
101	Meja Kerja Pejabat	29	APBD	Baik & Rusak ringan
102	Meja Kerja Pegawai	68	APBD	Baik & Rusak ringan
103	Meja Tamu Biasa	9	APBD	Baik & Rusak ringan
104	Kursi Kerja Pejabat	61	APBD	Baik & Rusak ringan
105	Kursi Kerja Pegawai	140	APBD	Baik & Rusak ringan
106	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	APBD	Rusak ringan
107	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	21	APBD	Baik & Rusak ringan
108	Camera + Attachment	1	APBD	Baik
109	Power Amplifier	1	APBD	Baik
110	Home Theater	1	APBD	Baik
111	Camera Digital	20	APBD	Baik & Rusak ringan
112	Tripod Camera	1	APBD	Baik
113	Lensa kamera	1	APBD	Baik
114	Mixer PVC	1	APBD	Baik
115	Loudspeaker	1	APBD	Baik
116	Facsimile	1	APBD	Rusak ringan
117	Global Position Satelite (GPS)	1	APBD	Rusak ringan
118	Tiang Listrik	12	APBD	Baik

119	Mobile Laboratorium Set	1	APBD	Baik
120	Test For Humydity	1	APBD	Rusak ringan
121	Alat ukur kemanisan buah	1	APBD	Baik
122	Autoclave	1	APBD	Baik
123	Laminar Air Flow	1	APBD	Baik
124	Hemacytemeter Complete	4	APBD	Baik & Rusak ringan
125	Frying Pan	2	APBD	Baik
126	Ice Maker	1	APBD	Baik
127	Mixer	1	APBD	Baik
128	Pompa Airasil	7	APBD	Baik & Rusak ringan
129	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1	APBD	Baik
130	Transimulator	1	APBD	Baik
131	Rod Blower	2	APBD	Baik
132	Tungku	1	APBD	Baik
133	Granulator	1	APBD	Baik
134	Mikroskop	1	APBD	Baik
135	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	APBN & APBD	Baik
136	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	7	APBD	Baik
137	Bangunan Sarana Kebersihan dan Kesehatan	2	APBD	Baik
138	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	APBD	Baik
139	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7	APBN & APBD	Baik
140	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1	APBD	Baik
141	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	3	APBD	Baik
142	Gedung Pos Jaga Permanen	5	APBD	Baik
143	Gedung Menara Peninjau Permanen	1	APBD	Baik

144	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	APBD	Baik
145	Lantai Jemur	2	APBD	Baik
146	Gudang Alsintan	2	APBD	Baik
147	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	APBD	Baik
148	Gedung Balai Latihan Pertanian	2	APBD	Baik
149	Gedung Bibit Pertanian	3	APBD	Baik
150	Gedung Gudang Benih Pertanian	6	APBD	Baik
151	Pagar Pengaman Bangunan Kantor	10	APBD	Baik
152	Pagar Bangunan lainnya	3	APBD	Baik
153	Gedung / Bangunan Parkir	2	APBD	Baik
154	Bangunan Taman	5	APBD	Baik
155	Jalan Khusus	12	APBD	Baik
156	Bendungan	2	APBD	Baik
157	Sumur dengan Pompa	4	APBD	Baik
158	Saluran Induk	6	APBD	Baik
159	Drainase/selokan air	1	APBD	Baik
160	Bangunan Pengeluaran/Pintu	1	APBD	Baik
161	Bangunan Pengaman Saluran Air / Talud	3	APBD	Baik
162	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	APBD	Baik
163	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	4	APBD	Baik
164	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	APBD	Baik
165	Bangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	APBD	Baik
166	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	1	APBD	Baik
167	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	1	APBD	Baik

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP
Kab. Magetan th. 2022*

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memiliki 1 (satu) urusan wajib, yaitu urusan ketahanan pangan, dan 1 (satu) urusan pilihan yaitu urusan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran/ target Perubahan Renstra periode sebelumnya (2013-2018) menurut indikator kinerja utama sebagaimana pada tabel 2.3. sedangkan capaian untuk pengelolaan keuangan selama periode 2013 sampai dengan 2018 ditampilkan pada tabel 2.4.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	PANGAN															
1	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	89,4	89,5	89,7	90	90	85,2	84,9	88,8	92,6			94,86%	100,78%	100%	
2	Penguatan cadangan pangan (%)	75	80	85	90	95	75	80	85	90		100%	123,25%	77,73%	100%	
3	Penanganan daerah rawan pangan (%)	20	40	60	80	100	20	40	60	80		100%	100%	100%	100%	
	PERTANIAN															
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (juta rupiah)	3.652.424,43	3.750.260,12	3.848.095,82	3.945.931,52	4.043.767,21	3.517.329,45	3.602.281,8	3.598.978,85	3.581.050,84			96,05%	89%	90,75%	
	Produksi pertanian															
	• Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.968.594	3.972.562	3.650.400	3.960.670	3.944.686	3.969.456	3.972.781		113,33	111,63%	113,3%	100%	
	• Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180	995.700	1.221.972	1.187.660	1.623.133		90,25	109,79%	90,24%	143,3%	
	• Kedelai (kw)	3.494.720	3.533.460	14.430	21.900	7.200	45.840	7179	10.420	14.710		13,12	0,2%	1,31%	67,1%	
	• Ubi Jalar (ton)	24.150	26.250	28.400	30.600	32.850	43.078	35.110	39.641	647.870		178,38	1337%	17837%	2117%	
	• Kelapa (kg)	1.231.500	1.231.800	1.232.100	1.232.400	1.232.700	922.000	727.000	887.600	170.523		74,87	59,01%	74,86%	13,8%	
	• Kopi (kg)	199.000	204.000	209.000	214.000	216.000	219.000	224.200	226.000	442.760		110,05	110,78%	110,01%	206,8%	

• Kakao (kg)	290.00 0	300.00 0	310.0 00	320.0 00	330.0 00	311.000	334.00 0	288.10 0	555.16 0		107,2 4	111,33 %	107,18 %	173,4 %
• Tebu (ton)	535.35 0	541.80 0	548.2 50	554.7 00	561.2 25	428.663	412.88 1	402.25 6	389.69 0		80,07	76,21 %	80,07%	70,25 %
• Tembakau (kw)	2.468	2.492	2.517	2.542	2.568	3.630	2480	2760	1.357		147,0 8	99,52 %	147,08 %	53,38 %
• Jeruk besar (kw)	189.65 1	191.54 7	262.5 74	262.8 36	155.0 00	262.050	149.38 0	244.39 5	511.51 7		138,1 7	77,99 %	138,17 %	194,6 %
• Strawberry (kw)	176	178	180	182	184	141	116	115	16		80,11	65,17 %	80,11%	8,7%
• Sayuran (Bw. Merah, Bw. Putih, Cabe, Kentang, Wortel) (kw)	319.05 9	322.25 0	325.2 50	328.7 27	332.0 14	333.354	332.48 3	435.98 3	424.46 1		104,4 8	103,18 %	131,24 %	129,1 2%

Berdasarkan tabel T-C.23. untuk masing – masing indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Urusan Ketahanan Pangan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu indikator untuk mengukur ketahanan pangan melalui pencapaian nilai ragam konsumsi pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi konsumsi pangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mengantisipasi adanya gizi buruk serta beragam penyakit yang disebabkan olehnya. Skor PPH yang tinggi menjadi situasi yang hendak dicapai oleh setiap pemerintah daerah dan pusat. Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan skor PPH sehingga dapat menambah kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Nilai capaian peningkatan skor PPH didapat melalui komposisi kelompok pangan utama untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH semakin tinggi, maka konsumsi pangan akan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Magetan dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karena mulai pulihnya daya beli masyarakat setelah terkena Pandemi Covid-19.

B. Urusan Pertanian

Selama periode tahun 2020-2021 untuk capaian kinerja urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut :

1. PDRB pertanian

PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu. PDRB pertanian di kabupaten Magetan pada tahun 2021 tidak memenuhi target Renstra. Kondisi Covid-19 bisa jadi berpengaruh pada produksi barang dan jasa.

2. Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi komoditas pertanian yang mencapai target adalah padi, jagung, ubi jalar, kopi, kakao, jeruk besar dan sayuran. Capaian kinerja tertinggi pada sayuran karena siklus tanaman hortikultura lebih cepat, sedangkan komoditas yang produksinya tidak mencapai target adalah kedelai, tebu, tembakau dan stroberi. Capaian kinerja untuk komoditas padi cenderung fluktuatif, kembali terjadi kenaikan sebesar 3,52 % di tahun 2022 dan sudah mencapai target RKPD tahun 2022. Capaian produksi jagung menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam tahun 2022 terjadi peningkatan hasil produksi sebesar 36,67 % dan melebihi capaian target RKPD tahun 2022.

Capaian keberhasilan produksi padi dan jagung tahun 2022 disebabkan produktivitas jagung meningkat untuk setiap hektarnya. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain: perbaikan penerapan pengelolaan teknologi budidaya akibat bantuan saprodi paket lengkap (bantuan benih, pupuk dan pestisida), peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat, perbaikan jaringan irigasi tersier, peningkatan perlindungan tanaman dari gangguan Organisme Pengganggu Tanaman, perbaikan penanganan pascapanen, peningkatan penyuluhan, pengawalan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas

pertanian serta kerja keras dan ketaatan petani dalam menyukseskan program pemerintah.

Capaian produksi komoditas ubi jalar cenderung positif dengan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Capaian produksi kedelai menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam rentang dua tahun terakhir terjadi peningkatan hasil produksi namun masih di bawah target..

Capaian produksi tebu dalam enam tahun terakhir terus mengalami penurunan dikarenakan hal berikut:

- a. luas tanam tebu menurun pada tahun 2020 yang disebabkan karena alih komoditas tanaman (dikarenakan adanya bantuan pengairan yang menyebabkan lahan mendapat air lebih banyak dari sebelum mendapat bantuan)
- b. Kurang cermatnya penetapan target kinerja angka yang menyebabkan tingginya target produksi tebu. Target yang ditetapkan pada awal renstra adalah angka produktivitas tebu yang diperoleh dari laporan pabrik gula setiap musim giling, tidak berdasar pada luas tanam tebu
- c. Penggunaan varietas Bulu Lawang secara terus menerus menyebabkan tanaman rentan penyakit luka api (petani lebih memilih varietas ini karena produksi relatif stabil Ketika dilakukan pengepresan beberapa kali)
- d. Tata niaga tebu yang kurang berpihak pada petani kecil menyebabkan animo petani untuk menanam tebu menurun disebabkan harga tebu tidak sesuai harapan petani.

Komoditi jeruk besar cenderung mengalami hasil produksi yang fluktuatif, dimana dalam dua tahun terakhir ini produksi jeruk besar naik secara signifikan sebesar 29,9 %. Sedangkan untuk komoditi stroberi mengalami tren penurunan selama enam tahun terakhir disebabkan oleh luas tanaman yang tidak meningkat dan diperparah dengan tidak ada program yang mendukung peningkatan produksi stroberi. Adanya anomali cuaca membuat petani memilih komoditas lain yang lebih aman, sehingga Ketika ditawarkan program peningkatan produksi stroberi petani menolak. Komoditas kelapa juga mengalami penurunan karena adanya serangan hama wawung

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke (%)				Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengembangan cadangan pangan daerah	230.000.000	1.727.176.700			201.701.367	1.633.088.755			87,70%	94,55%			650,94%	709,65%
Peningkatan pola Konsumsi Pangan	345.000.000	907.340.000			333.036.841	860.429.477			96,53%	94,83%			162,99	158,35
Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	154.000.000	60.000.000			139.202.000	59.644.030			90,39%	99,41%			-61,03	-57,15
Pengembangan Olahan hasil Pertanian	275.000.000	10.255.150			261.546.250	9.898.650			95,11%	96,52%			-96,27	-96,21
GAJI	9.531.939.309	9.358.168.132			8.831.157.688	8.639.591.253			92,65%	92,32%			-1,82	-2,169
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.000.000	770.250.000			805.763.976	750.754.188			97,67%	97,47%			-6,63	-6,82
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	225.000.000	87.500.000			224.439.941	10.920.250			99,75%	75,21%			-61,11	-95,13
Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	14.520.250			19.980.000	76.908.405			99,90%	87,90%			-27,39	284,92
Pembangunan gedung kantor	1.360.000.000	329.786.652			1.342.374.690	320.130.000			98,70%	97,07%			-75,75	-76,15
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	675.000.000	20.000.000			662.775.500	15.092.400			98,19%	75,46%			-97,03	-97,72

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.000.000	131.700.000			248.220.841	112.936.243			99,29%	85,75%			-47,32	54,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas		9750000				9.750.000				100,00%				
Pengadaan Perlengkapan Kantor	250.000.000	12867000			240.127.800	11.962.800			96,05%	92,97%			-94,85	-95,01
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.000.000	24250000			42.064.300	24.249.400			93,48%	100,00%			-46,11	-42,35
Pembangunan gedung Balai Penyuluh Pertanian	1.500.000.000	249539506			1.379.925.600	246.304.000			92,00%	98,70%			-83,36	-82,15
Pengadaan perlengkapan balai penyuluhan pertanian	878.170.000	27300000			684.422.500	-			77,94%	0,00%			-96,89	
Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian (BU dan pendamping DAK)		54000000				44.524.200				82,45%				
Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	9500000			22.759.600	8.113.000			91,04%	85,40%				-64,35
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000	-			66.513.120	-			88,68%	-				
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12340100			19.745.000	12.239.350			98,73%	99,18%			-38,29	-38,01
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	160.000.000	83912500			154.954.500	81.167.500			96,85%	96,73%			-47,55	-47,61
Peningkatan kemampuan lembaga petani	75.000.000	60.900.000			74.049.000	60.721.650			98,73%	99,71%			-18,8	-17,99
Promosi atas hasil produksi	675.000.	169.904.			661.974.	165.015.			98,07%	97,12%			-74,82	-75,07

pertanian/perkebunan unggulan daerah	000	750			150	600								
Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	2.095.000.000	586.275.000			2.072.942.492	576.287.335			98,95%	98,30%			-72,01	-72,19
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.210.000.000	1.769.827.900			1.163.613.149	1.654.864.401			96,17%	93,50%			46,26	42,21
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	570.000.000	426.400.000			566.377.700	421.062.450			99,36%	98,75%			-25,19	-25,65
Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau	102.600.000	99.318.000			102.515.000	60.560.900			99,92%	60,98%			-3,19	-40,92
Penanganan panen dan pasca panen	400.000.000	275.000.000			363.285.000	251.327.750			90,82%	91,39%			-31,25	-30,81
Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	230.000.000	255.000.000			222.913.200	250.265.850			96,92%	98,14%			10,86	12,27
Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	120.000.000	120.000.000			119.930.000	86.841.100			99,94%	72,37%			0	-27,59
Penerapan inovasi teknis	50.000.000	150.682.000			50.000.000	26.256.800			100,00%	17,43%			201,364	-47,48
Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Sereal	1.085.000.000	500.000.000			1.055.321.100	488.136.250			97,26%	97,63%			-53,91	-53,74
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	300.000.000	115.000.000			292.011.000	110.480.000			97,34%	96,07%			-61,66	-62,16
Pengendalian Organisme	400.000.000	101.376.000			397.108.000	101.208.000			99,28%	99,83%			-74,65	-74,51

Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan	000	850			650	850								
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	3.180.00 0.000	1.780.30 2.950			3.044.34 0.900	1.549.73 6.375			95,73%	87,05%			-44,015	-49,09
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	550.000. 000	382.373. 500			531.259. 000	337.842. 450			96,59%	88,35%			-48,98	-36,40
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	425.000. 000	216.807. 000			419.798. 000	206.903. 250			98,78%	95,43%			-48,98	-50,71
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	300.000. 000	199.300. 000			117.485. 000	170.876. 450			39,16%	85,74%			-33,56	45,44
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	300.000. 000	21.577.5 00			258.004. 000	21.577.5 00			86,00%	100,00%			-92,80	-91,63
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	110.000. 000	84.925.3 00			105.900. 000	82.365.0 00			96,27%	96,99%			-52,85	-22,22
Penanganan pasca panen hasil perkebunan	50.000.0 00	23.575.0 00			48.594.0 00	23.507.5 00			97,19%	99,71%			-52,85	-51,62
Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	9.169.80 0.000	8.761.30 0.000			8.936.43 9.950	8.573.79 8.791			97,46%	97,86%			-4,454	-4,05
Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	15.763.9 00.000	10.685.9 35.000			15.427.8 85.117	10.534.8 31.844			97,87%	98,59%			-32,21	-31,71
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	305.000. 000	308.000. 000			259.951. 500	307.072. 620			85,23%	99,70%			0,98	18,12

Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	2.117.750.000	1.880.000.000			2.096.924.945	1.880.000.000			99,02%	100,00%			-11,22	-10,34
Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	442.500.000	370.000.000			372.777.739	345.018.700			84,24%	93,25%			-16,38	-7,44
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	180.000.000	54.928.050			177.336.000	51.747.655			98,52%	94,21%			-69,48	-70,81
Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman Daerah)	100.000.000	25000000			92.677.037	8.852.950			92,68%	35,41%			-75	-90,44
Rehabilitasi Jalan Usahat Tani dan Produksi (DID Tambahan)		600.000.000				595.066.000				99,18%				
Biaya Pendamping Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dan Produksi DID-T(DAU)		25.000.000				22.919.750				91,68%				
Pengadaan Prasarana Pertanian / Perkebunan (DID Tambahan)		4.800.000.000				4.435.556.250				92,41%				
Biaya Umum Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi PertanianDID-T (DAU)		174.000.000				146.550.000				84,22%				
Penyediaan sarana prasarana agrowisata	900.000.000	3.745.525.250			840.658.420	3.368.514.723			93,41%	89,93%			316,16	300,69
Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata (DID Tambahan)		430.000.000				423.275.000				98,44%				
Belanja bantuan sosial kepada petani miskin	500.000.000	500.000.000			8.042.500	432.933.350			1,61%	86,59%				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN														

KEMANDIRIAN PANGAN														
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			0,00	22.500.000			0,00	22.457.900			0	99,81		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan														
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			0,00	10.500.000			0,00	10.498.625			0	99,98		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			50.000.000,00	50.000.000			49.458.332,00	49.187.000			98,91	98,37	0	-0,54
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			35.000.000,00	28.500.000			34.360.000,00	27.958.625			98,17	98,1	-18	-18,63
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			11.160.000,00	10.500.000			10.560.000,00	10.500.000			94,62	100	5	-0,56
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														
Penyusunan dan Penetapan Target			265.000.000,00	170.000.000			262.288.370,00	164.917.			98,97	97,01	-35	-37,12

Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun							069							
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			140.000.000,00	60.000.000			138.970.000,00	52.000.000			99,26	86,67	-57	-62,581
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN														
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan														
Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			11.000.000,00	14.000.000			10.570.000,00	13.896.500			96,09	99,26	27	31,47
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota			95.590.000,00	70.000.000			92.730.000,00	54.320.000			97	77,6	-26	-41,42
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			362.425.800,00	265.000.000			335.366.300,00	56.180.000			92,53	21,2	-26	-83,248
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota														
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota			20.000.000,00	24.000.000			18.913.000,00	23.757.570			94,56	98,98	20	25,61
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal			40.000.000,00	35.000.000			38.321.000,00	33.064.9			95,8	94,47	-12,5	-13,71

Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota								00						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84.499.9 50,00	67.500.0 00				80.798.8 50,00	66.528.4 50		95,61	98,56	-20	-17,66
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.867.0 19.251,0 0	12.721. 851.30 0				11.772. 481.79 6,00	11.959.3 74.564		94,00		-14	1,587
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			300.000. 000,00					256.103. 100,00			85,36			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - Undangan			9.999.90 0,00					7.379.90 0,00			73,79			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			9.995.05 0,00	8.811.55 0				9.995.05 0,00	8.611.55 0		100	97,73	-11	-13,84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			106.700. 200,00	239.590. 150				94.876.3 00,00	227.263. 700		88,91	94,73	124	139,53
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			62.333.0 00,00	45.045.0 00				61.133.0 00,00	44.638.8 00		98,07	99,09	-27	-26,98
Penyediaan Barang Cetakan			32.022.5 00,00	23.644.0 00				31.422.5 00,00	21.202.9 00		98,12	89,67	-26	-32,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			7.900.00 0,00	8.000.00 0				7.570.00 0,00	7.730.00 0		95,82	96,62	12	-32,52

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			43.300.000,00	80.850.000			43.194.740,00	78.410.215			99,75	96,98	86	81,52
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			212.946.400,00	209.150.000			175.500.521,00	190.773.882			82,41	91,21	-1,7	8,702
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.999.950,00	52.280.000			24.846.500,00	51.251.000			99,38	98,03	109	106,27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.125.484.400,00	1.162.328.400			1.001.152.100,00	1.153.754.000				99,26	3,2	15,24
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37.937.750,00	36.000.000			35.324.298,00	32.670.000			93,11	91,14	-0,5	-7,51
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			75.400.500,00	69.257.000			71.129.115,00	63.125.897			94,33	90,75	-0,8	-11,25
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			22.600.000,00	990.250.000			22.000.000,00	976.840.069			97,34	98,64	4281	4340,18
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.199.500,00	19.800.000			9.950.000,00	19.280.000			97,55	97,37	94	93,76
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2.812.33 9.800,00	5.793.79 8.800			2.641.97 7.925,00	5.467.50 1.829			93,94	94,36	-25	106,94
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			941.728. 800,00	1.207.54 8.500			782.473. 345,00	1.087.40 3.500			83,08	90,05	28	38,97
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota														
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman			1.316.81 5.900,00	1.650.50 0.000			1.273.32 0.274,00	1.645.39 7.294			96,69	99,69	25	29,22
Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman			207.811. 500,00	634.661. 000			192.560. 500,00	606.379. 120			92,66	99,16	205	214,903
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN														
Pengembangan Prasarana Pertanian														
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B			108.164. 100,00	355.000. 000			106.071. 300,00	354.410. 650			98,06	99,83	228	234,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			2.550.55 8.500,00	4.642.32 5.000			2.173.62 0.250,00	4.174.47 3.187			85,22	89,92	82	92,05
Pembangunan Prasarana Pertanian														

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			8.378.50 0.000,00	13.165.5 50.000			8.041.25 6.907,00	12.924.9 20.875			95,97	98,17	57	60,73
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			120.000. 000,00				120.000. 000,00						0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			8.355.84 0.000,00	16.056.7 00.000			8.272.80 1.200,00	15.765.2 58.895			99	98,18	92	90,56
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			3.940.00 0.000,00	-			3.785.00 0.000,00	-			96	-	0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya			2.204.43 9.480,00	-			2.000.79 5.700,00	-				-	0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			4.068.89 8.550,00	3.009.68 6.250			3.611.67 8.914,00	2.993.28 4.990			88,7	99,45	26	-17,12
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota														
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			101.003. 600,00	469.000. 000			97.076.9 50,00	465.892. 700			96,11	99,16	364	379,92
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan			154.999. 400,00	302.800. 000			144.581. 469,00	278.857. 575			93,27	92,09	95	92,87

dan Desa														
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			40.000.000,00	63.000.000			24.999.000,00	46.265.000			62,49	73,43	57	85,06
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			183.690.000,00	800.000.000			120.201.400,00	664.317.950			65,43	83,03	335	452,67
			53.548.303.781	64.565.726.950										

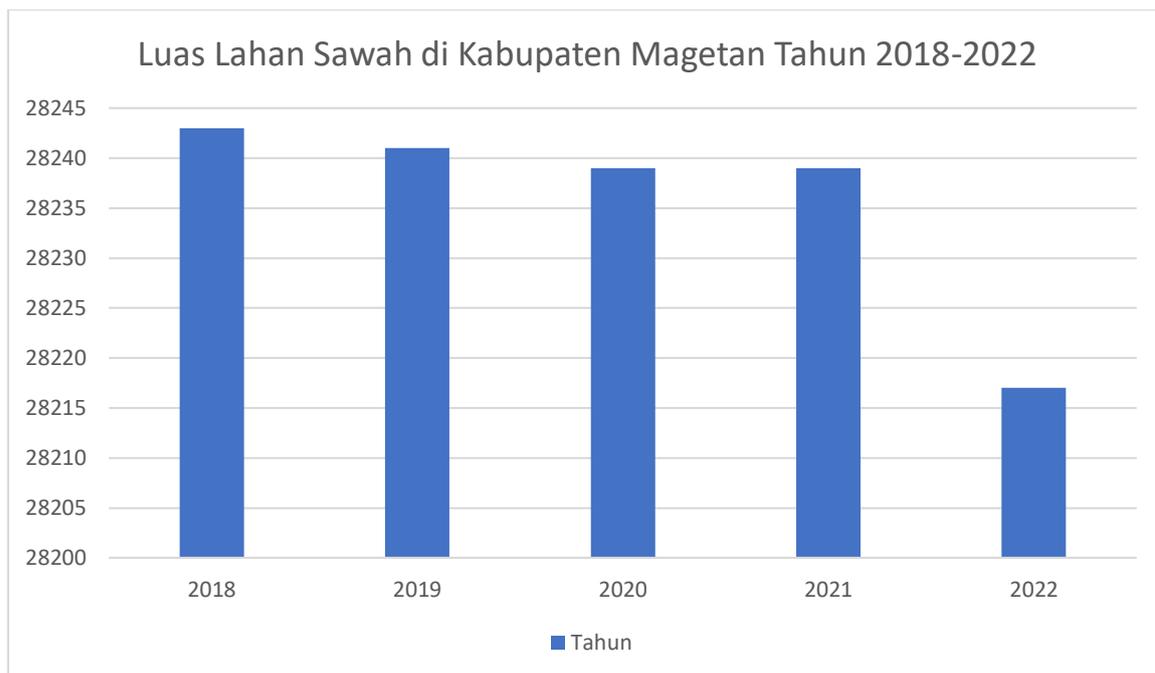
Secara umum pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Walaupun secara umum pagu total mengalami kenaikan namun terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan anggaran. Kenaikan anggaran secara signifikan terjadi saat PAPBD 2022. Jumlah pagu anggaran yang besar masih didominasi oleh sub kegiatan yang menangani pekerjaan fisik di bidang pertanian.

Sebagian besar realisasi anggaran mencapai di atas 90%. Adanya realisasi anggaran yang rendah pada beberapa sub kegiatan dikarenakan adanya kondisi covid-19 yang mengurangi intensitas pergerakan ataupun kegiatan yang melibatkan banyak orang

2.4. Tantangan dan Peluang

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Berdasarkan data potensi wilayah, sebagian besar wilayah di Kabupaten Magetan merupakan wilayah potensi pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura sehingga merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Magetan. Selama ini, pertumbuhan produksi pertanian di Kabupaten Magetan masih berbasis pada ketersediaan lahan dan pertumbuhan produktivitas masih mengalami peningkatan. Namun ketersediaan lahan selama 10 tahun terakhir cenderung menurun. Penyebab utamanya adalah, alih fungsi lahan pertanian dari beberapa kegiatan ekonomi yang masih terus berlangsung sehingga perkembangan luasan lahan pertanian setiap tahun berubah peruntukannya.

Gambar 2.2. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magetan, tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas TPHPKP

Perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Magetan menurut Kabupaten Magetan selama Tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022. Hal ini karena adanya pengalihan lahan menjadi lahan bukan pertanian (jalan, sungai, pemukiman dll)

Tantangan pembangunan pertanian ke depan dari infrastruktur dan prasarana serta sarana pertanian di Kabupaten Magetan yaitu bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim; mengupayakan dukungan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 jumlah jaringan irigasi tersier yang telah diperbaiki sebanyak 179 titik di 18 kecamatan dengan Panjang 12.740 m. Tentunya jumlah ini masih kurang mencukupi dibandingkan luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Magetan yakni seluas 28.217 hektar.

Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan keselarasan dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, serta aspek lain yang terkait dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Hasil telaah atas dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil kajian/telaah atas peluang dan tantangan dalam 3 tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dituangkan sebagai berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi diantaranya :
 1. Ketersediaan air
 2. Perbaikan infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan
 3. Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian
 4. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam yang menyebabkan turunnya daya dukung alam
 5. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian(pemukiman dan industri)
 6. Menurunnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian
 7. Penerapan pertanian dengan prinsip ramah lingkungan
 8. Penanganan pascapanen serta pemberian nilai tambah pada produk pertanian
 9. Penerapan teknologi di bidang pertanian
- b. Peluang dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan
 1. Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk yang terus meningkat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani
 2. Peluang investasi dibidang agroindustri dan agribisnis cukup besar;
 3. Tersedianya fasilitas permodalan dari Bank/Lembaga Keuangan non-Bank;
 4. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/ produsen;
 5. Terdapat kesenjangan antara produksi potensial dan aktual.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan PD

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian 3 (tiga) tahun kedepan. Permasalahan- permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW), LP2B • Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian • Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magetan sedang disusun dan belum diterapkan • Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.
2	Infrastruktur pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian • Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian • Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan • Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani

3	Sarana pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyediaan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan • Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi
4	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target
5	Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal • Fasilitasi pengendalian OPT • SLPHT belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
6	Rendahnya posisi tawar petani	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
7	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme harga pasar • Adanya perdagangan bebas • Kebijakan penetapan harga dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak
8	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)	<ul style="list-style-type: none"> • Umur dan tingkat pendidikan petani • Formasi petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pertanian kurang dari kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi • Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kab Magetan 2024-2026

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	1.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
	1.2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	3.2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	4.1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem
	4.2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah
	4.3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	5.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
	5.2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah
	5.3 Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik
	5.4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	5.5 Meningkatnya Profesionalisme dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan pertama RPD Kabupaten Magetan berikut ini :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya intensifikasi pertanian	Provitas komoditas pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Padi • Jagung • Jeruk Pamelor • Tebu
		Meningkatnya diversifikasi pertanian	Persentase jumlah Produk Pertanian yang diterima pasar
		Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya
		Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan daerah pada Dinas TPHP	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas TPHP • Nilai SAKIP Dinas TPHP

3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Kementerian Pertanian

No.	Sasaran Jangka Menengah Perubahan	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	n Renstra K/L	Magetan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disusunnya Raperda LP2B
		<p>pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Banyaknya jumlah petani dengan kualitas SDM yang bervariasi dan rata-rata masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan lembaga tani

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Masih rendahnya kualitas SDM Pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman
	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Daya saing 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkembangnya pasar bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sertifikasi produk pertanian

		produk pertanian yang relatif rendah		
	Peningkatan kesejahteraan petani	Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha	Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani	Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Jangka Menengah Perubahan Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur				
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Kegiatan usaha tani sebagian besar masih Bersifat subsistem Dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)	Pola pikir/ anggapan belum makan kalau belum makan nasi	Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal

2	<p>Mempertahankan swasembada Padi dan jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan tanaman Pangan Utama Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu perlindungan tanaman
---	--	---	---	---

		<p>kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 		
3	<p>Pengamanan dan peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak ▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah ▪ Daya saing produk pertanian yang relatif rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran ▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak ▪ Berkembangnya pasar bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian ▪ Sertifikasi produk pertanian
4	<p>Peningkatan Mutu Produk dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura berbasis sumberdaya</p>	<p>Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha</p>	<p>Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani</p>	<p>Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program – kredit pertanian</p>

	lokal yang berkelanjutan			
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan ▪ Mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal ▪ Mempertahankan existing lahan history perkebunan ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan ▪ Meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan ▪ Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu ▪ Meningkatkan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan ▪ Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca panen Perkebunan ▪ Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan ▪ Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan ▪ Meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani ▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian ▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur ▪ Pelaksanaan SL Iklim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman
--	---	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Andalan	a. Barat b. Kartoharjo c. Karangrejo d. Maospati e. Takeran f. Nguntoronadi g. Plaosan h. Panekan i. Sidorejo j. Takeran k. Poncol	a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan Sumberdaya Buatan.	a. Barat (Padi, Kedelai) b. Kartoharjo (Padi, Kedelai) c. Karangrejo (padi) d. Maospati (Padi) e. Takeran (Padi) f. Nguntoronadi (Padi) g. Plaosan (Jagung, Ubi Jalar) h. Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung) i. Sidorejo (Ubi Jalar) j. Takeran (Kedelai) k. Poncol (Jagung)

Tabel 3.6. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magetan

No.	Rencana Struktur Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Kawasan Andalan	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan 	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan Sumberdaya Buatan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Plaosan (Hortikultura) b. Sidorejo (Hortikultura) c. Poncol (Hortikultura) d. Panekan (Hortikultura) e. Bendo (Jeruk Pamelos) f. Takeran (Jeruk Pamelos) g. Sukomoro (Jeruk Pamelos) h. Kawedanan (Jeruk Pamelos) i. Maospati (Jeruk) j. Nguntorondi (Jeruk)
----	-----------------	--	--	--	--

Tabel 3.7. Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan terhadap RTRW Kabupaten Magetan

No.		Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)

1.		<p>a. Kawasan Andalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barat (Padi, Kedelai) • Kartoharjo (Padi, Kedelai) • Karangrejo (padi) • Maospati (Padi) • Takeran (Padi) • Nguntoronadi (Padi) • Plaosan (Jagung, Ubi Jalar) • Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung) • Sidorejo (Ubi Jalar) • Takeran (Kedelai) • Poncol (Jagung) <p>b. Kawasan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plaosan (Hortikultura) • Sidorejo (Hortikultura) • Poncol (Hortikultura) • Panekan (Hortikultura) • Bendo (Jeruk Pamelon) • Takeran (Jeruk Pamelon) • Sukomoro (Jeruk Pamelon) • Kawedanan (Jeruk Pamelon) • Maospati (Jeruk) • Nguntoronadi (Jeruk) 	<p>a. Alih Fungsi Lahan yang bukan menjadi kewenangan Dinas TPHPKP</p>	<p>b. Semakin tingginya alih fungsi lahan</p> <p>c. Keterbatasan permodalan petani</p>	<p>a. Penerapan teknologi ramah lingkungan</p> <p>b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian</p>
----	--	---	--	--	---

Meningkatnya alih fungsi lahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dimana kawasan yang semula merupakan kawasan untuk konservasi menjadi lahan budidaya yang menyebabkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air menjadi berkurang dan rusaknya struktur tanah sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi menyebabkan meningkatnya erosi dan banjir. Dalam

pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan perlu disusun suatu arahan perencanaan dan program yang meliputi :

- A. Arahan rencana pengendalian kawasan terbangun, meliputi :
 - a. Pembatasan pembangunan pada kawasan konservasi dan lahan pertanian produktif
 - b. Pengetatan aturan dan perijinan yang berhubungan dengan alih fungsi lahan (Perda c.IMB) untuk kawasan terbangun.
 - c. Sistem *reward dan punishment* untuk mengurangi terjadinya alihfungsi lahan dengan sanksi yang tegas.
- B. Arahan rencana pengendalian alih fungsi lahan meliputi :
 - a. Program alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
 - b. Perlindungan dan pencegahan alih fungsi lahan pada kawasan lindung dan konservasi.

3.5. Isu-Isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 3 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tahun 2020 – 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-65 tahun) mencapai 70 persen, sementara sisanya 30 persen adalah usia nonproduktif (< 15 th dan >65 th). Bonus demografi ini bisa menjadi peluang juga dapat menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dan memadai serta pada saat yang sama perlu dilakukan penyiapan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Bagi sektor pertanian hal ini juga bisa menjadi ancaman manakala yang terjun ke sektor pertanian hanya berasal dari sisa bonus demografi (kualitas rendah) sehingga malah akan menyebabkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian. Untuk itu, menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan tenaga kerja pertanian yang mampu menguasai teknologi pertanian dan mau terjun ke bidang pertanian.

Sehubungan dengan revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi yang cukup bagi para petani agar dapat memasarkan hasil pertanian dan turunannya lebih cepat melalui jaringan digital.

Idealnya, di era revolusi industri saat ini, petani dapat memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Berbagai aplikasi bermunculan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Namun hal tersebut tidak efektif karena petani masih banyak petani yang kurang melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain untuk mengelola hasil pertanian yang lebih efektif dan *profitable* dengan mengkolaborasikan petani yang sudah mempunyai pengalaman dan ketrampilan dengan pemuda yang melek teknologi sebagai agen pemasaran hasil pertanian dalam suatu kelompok.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian tiga tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pertanian baik SDM petugas

maupun SDM petani, maupun kelembagaan petani terkhusus petani milenial melalui kepedulian dan keperpihakan terhadap penyuluh pertanian lapang dan petani

2. Pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor non pertanian
3. Pengurangan dampak adanya gejala perubahan iklim akibat pemanasan global
4. Pembangunan sistem pertanian dari hulu sampai ke hilir
5. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Perubahan Renstra adalah bahwa dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPD. Dengan Demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra mengacu pada RPD. Cascading kinerja RPD dan Perubahan Renstra dinas sebagai berikut:

Tujuan ke- 1 RPD: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi.	
Sasaran ke- 1.1 RPD: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan.	
Indikator RPD:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Tukar Petani (NTP) 2. Persentase PDRB Sektor Pertanian. 	
Tujuan ke-1 Dinas: Meningkatkan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Indikator: Produksi komoditas pertanian Padi (kw) Jagung (kw) Jeruk pabelo (kw) Tebu (kw)
Sasaran ke 1 Dinas: Meningkatnya intensifikasi pertanian	Indikator: Provititas komoditas pertanian Padi (kw/ha) Jagung (kw/ha) Jeruk pabelo (kw/pohon) Tebu (kw/ha)
Sasaran ke 2 Dinas : Meningkatnya diversifikasi pertanian	Persentase jumlah produk pertanian yang diterima pasar (%)
Sasaran ke 3 Dinas : Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya (%)
Sasaran ke 4 Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan daerah pada Dinas TPHP	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas TPHP (skor) • Nilai SAKIP Dinas TPHP (skor)

Sejalan dengan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan akan mendukung terlaksananya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

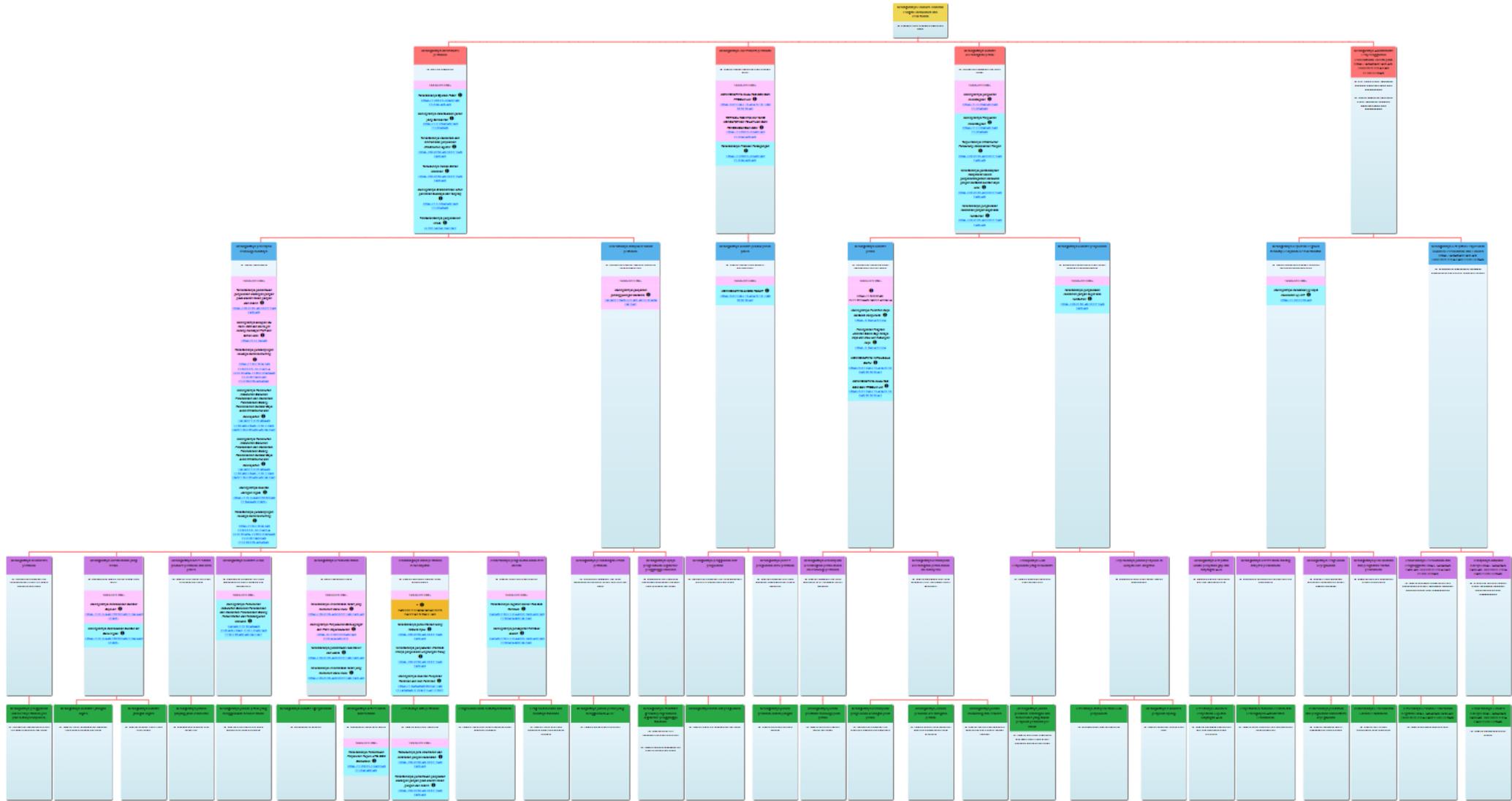
Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3		
1	Meningkatkan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		Produksi komoditas pertanian :					
			Padi (kw)	3.538.629	3.582.243	3.635.198		
			Jagung (kw)	1.516.395	1.558.349	1.603.768		
			Jeruk pamelon (kw)	204.000	270.000	332.500		
			Tebu (ton)	368.500	385.250	402.000		
			1. Meningkatnya intensifikasi pertanian	Provitas komoditas pertanian :				
				Padi (kw/ha)	64,32	64,93	65,72	
				Jagung (kw/ha)	75,42	75,56	76,75	
				Jeruk pamelon (kw/pohon)	0,48	0,64	0,78	
				Tebu (kw/ha)	624,79	653,19	681,59	
				2. Meningkatnya diversifikasi pertanian	Persentase jumlah produk pertanian yang diterima pasar (%)	20	20	20
				3. Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya (%)	2	2,5	3
				4. Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas TPHP (skor)	80,25	80,50	80,75

		daerah pada Dinas TPHP pada Dinas TPHP				
			Nilai SAKIP Dinas TPHP (skor)	89	89,5	90

4.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



- 4.3. Cascading Kinerja Perangkat Daerah Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**CASCADING PENGINTEGRASIAN
ANTARA KINERJA RPD DAN
RENSTRA DTPHP 2024-2026**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi kerakyatan
Pertumbuhan ekonomi

Meningkatkan kontribusi sektor unggulan
Presentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Meningkatnya Provitass Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

TUJUAN RPD

SASARAN RPD

TUJUAN PD

SASARAN PD

BUPATI

Eselon 2



BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dapat dilihat tabel 5.1. dibawah.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya intensifikasi pertanian	1. Meningkatkan Luas Tanam	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
				2. Penerapan Teknologi Budidaya
				3. Pembinaan dan pemberian sarana produksi pertanian/ perkebunan
			2. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan Daerah yang didukung oleh tripel agro (agrowisata, agroindustri dan agrobisnis)	4. Mengembangkan agrowisata buah, sayur dan bunga
		Meningkatnya diversifikasi pertanian	3. Mengintegrasikan sektor hulu dan hilir pertanian	5. Pemberian bantuan alat pascapanen dan olahan
			4. peningkatan penanganan pasca panen dan pemasaran produk pertanian	6. Pemberian pelatihan pascapanen dan olahan produk pertanian
		Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	5. Peningkatan keberdayaan petani melalui peningkatan	7. Pelatihan manajerial dan teknis untuk petani

			SDM dan mendorong terbentuknya korporasi petani	
			6. Peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian Lapang (baik ASN maupun swadaya) yang berfungsi sebagai Fasilitator, innovator dan motivator petani	8. Sertifikasi dan pelatihan Penyuluh Pertanian Lapang
		Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik perangkat daerah	7. Meminimalisir kesenjangan antara tingkat layanan di Dinas TPHP dengan harapan dan keinginan stakeholder	9. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan 10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGATAN

6.1. Rencana Program

Penyusunan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Magetan untuk tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Dari sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Magetan Tahun 2024-2026 tersebut dijabarkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Program penyuluhan pertanian

Program-program tersebut diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

6.2. Rencana Kegiatan

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah disampaikan pada bab 2, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,

- dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
 5. Program penyuluhan pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi

Pertanian

Tolok ukur kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan selama periode waktu tahun 2024 – 2026 dijabarkan dalam tabel T-C.27. berikut.

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator tujuan sasaran program kegiatan sub kegiatan (output)	Baselin e 2023	2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Perubahan Renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP Indeks		80,25	14.451.000.000	80,50	14.451.000.000	80,75	14.651.000.000	80,75	56.655.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen		9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	150.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan		9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	450.000.000	DINAS TPHP	

		3.27.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		80	12.410.000.000	80	12.410.000.000	80	12.410.000.000	76	37.230.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan		131	12.410.000.000	131	12.410.000.000	131	12.410.000.000	76	37.230.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket		100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	648.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.2.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	DINAS TPHP	

				Bangunan Kantor yang Disediakan paket										
		3.27.0 1.2.6. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket		1	100.000.0000	1	100.000.0000	1	100.000.0000	3	300.000.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.6. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.6. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.6. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen		1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.6. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan		2	0	2	0	2	200.000.000	6	200.000.000	DINAS TPHP

			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah unit										
		3.27.01.2.02	Pengadaan kendaraan dinas atau operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disdiakan unit		2	0	2	0	2	200.000.000	6	200.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	3.540.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dediaikan		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	DINAS TPHP

				laporan										
		3.27.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan		12	1.000.00 0.000	12	1.000.00 0.000	12	1.000.00 0.000	36	3.000.00 0.000	DINAS TPHP
		3.27. 01.2. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		100	495.00 0.000	100	495.000 .000	100	495.00 0.000	100	1.485.00 0.000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit		5	30.000.0 00	5	30.000.0 00	5	30.000.0 00	5	90.000.0 00	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit		1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	150.000. 000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh		5	400.000. 000	5	400.000. 000	5	400.000. 000	5	1.200.00 0.000	DINAS TPHP

				abilitas unit											
		3.27.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	DINAS TPHP	
Meningkatkan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP Indeks		80,25	14.761.000.000	80,50	14.761.000.000	80,75	14.961.000.000	80,75	42.428.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.01.1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		9	85.000.000	9	85.000.000	9	85.000.000	27	255.000.000	DINAS TPHP	

				Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Dokumen										
		3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah laporan		9	85.000.000	9	85.000.000	9	85.000.000	27	255.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah %		80	12.000.000.000	80	12.000.000.000	80	12.000.000.000	240	36.000.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.1.01.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan		131	12.000.000.000	131	12.000.000.000	131	12.000.000.000	393	36.000.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur Orang		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.1.	Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Penyediaan		5	216.000.000	5	216.000.000	5	216.000.000	15	648.000.000	DINAS TPHP

		6	Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Paket										
		3.27.0 1.1.6. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket		1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	3	24.000.0 00	DINAS TPHP
		3.27.0 1.1.6. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket		1	100.000. 0000	1	100.000. 0000	1	100.000. 0000	3	300.000. 000	DINAS TPHP
		3.27.0 1.1.6. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket		1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	3	75.000.0 00	DINAS TPHP
		3.27.0 1.1.6. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan paket		1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	1	25.000.0 00	3	75.000.0 00	DINAS TPHP
		3.27.0 1.1.6. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	1	8.000.00 0	3	24.000.0 00	DINAS TPHP

				Undangan yang Disediakan dokumen										
		3.27.01.1.6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah unit						1	200.000.000	27	200.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.02	Pengadaan kendaraan dinas atau operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disdiakan unit						1	200.000.000	27	200.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan		25	1.720.000.000	25	1.720.000.000	25	1.720.000.000	125	5.160.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,		12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	36	360.000.000	DINAS TPHP

				Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan										
		3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dediaikan laporan		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan		12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	36	4.500.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara Unit		100	640.000.000	100	640.000.000	100	640.000.000	100	1.720.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit		5	55.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	165.000.000	DINAS TPHP
		3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000	DINAS TPHP

			Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit											
		3.27.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi unit		5	385.000.0 00	5	385.000.0 00	5	385.000.0 00	5	1.155.000 .000	DINAS TPHP	
		3.27.0 1.2.09 .0001 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi unit		1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	1	50.000.00 0	1	150.000.0 00	DINAS TPHP	
Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatkannya produksi komoditas pertanian, hortikultura	3.27.2.2.01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provititas padi (kw/ha)		64,32	4.750.000.000	64,81	4.750.000.000	65,52	4.750.000.000	65,52	1.425.000.000	DINAS TPHP	

	dan perkebunan													
		3.27.2.2.0.1.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah diversifikasi produk pertanian produk		2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	6	6.000.000.000	DINAS TPHP
		3.27.2.2.01.0003	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi laporan		5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	15	4.500.000.000	DINAS TPHP
		3.27.2.2.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian laporan		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	DINAS TPHP
		3.27.2.2.0.2.0002	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya komoditas unggul di Magetan komoditas		8	2.750.000.000	8	2.750.000.000	8	2.750.000.000	8	8.250.000.000	DINAS TPHP
		3.27.2	Penjaminan			1	50.000.	1	50.000.	1	50.000.	3	150.000	DINAS

		.2.02. 0003	Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian VUB			000		000		000		.000	TPHP	
		3.27.0 3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan /Tumbuhan dokumen		1	1.200.00 0.000	1	1.200.00 0.000	1	1.200.00 0.000	3	3.600.00 0.000	DINAS TPHP	
		3.27. 03.2. 01	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dokumen		2	1.500.00 0.000	2	1.500.00 0.000	2	1.500.00 0.000	6	4.500.00 0.000	DINAS TPHP	
Meningkatkan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan	Meningkatkannya intensifikasi pertanian	3.27. 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitas padi (kw/ha)		64,32	4.950.0 00.000	64,81	4.950.0 00.000	65,52	4.950.0 00.000	65,52	14.850.0 00.000	DINAS TPHP	

perkebunan															
	Meningkatnya diversifikasi pertanian	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian laporan		2	2.200.000.000	2	2.200.000.000	2	2.200.000.000	6	6.600.000.000.000	DINAS TPHP	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian laporan		1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	3.000.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak ton		75	1.200.000.000	75	1.200.000.000	75	1.200.000.000	225	3.600.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dokumen		6	2.750.000.000	6	2.750.000.000	6	2.750.000.000	18	8.250.000.000.000	DINAS TPHP	

	3.27.0 2.2.02 .0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan /Tumbuhan dokumen		3	1.750.000. 000	3	1.750.000.0 00	3	1.750.000.0 00	9	5.250.000. 000	DINAS TPHP	
	3.27.0 2.2.02 .0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dokumen		3	1.000.000. 000	3	1.000.000.0 00	3	1.000.000.0 00	9	3.000.000. 000	DINAS TPHP	
	3.27.0 3.2.01 .0003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman angka		2,42	8.000.00 0.000	2,4 3	8.000.000 .000	2,44	8.000.000 .000	2,44	24.000.00 0.000	DINAS TPHP	
	3.27.0 3.2.01 .0008	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terlayani pupuk bersubsidi %		100	700.000. 000	100	700.000.0 00	100	700.000.0 00	100	2.100.000. 000	DINAS TPHP	
	3.27.0 3.2.01 .0010	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)		1	200.000.00 0	1	200.000.00 0	1	200.000.00 0	3	600.000.00 0	DINAS TPHP	
	3.27.0 3.2.01 .0001 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya laporan		13	500.000.00 0	13	500.000.00 0	13	500.000.00 0	39	1.500.000. 000	DINAS TPHP	

			Lainnya											
		3.27.0 3.2.01 .0001 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas areal yang terlayani irigasi ha	700	7.300.000.000	800	7.300.000.000	900	7.300.000.000	900	21.900.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.01 .0001 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara unit	53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	159	9.000.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.01 .0001 7	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara unit	66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	198	10.200.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara unit	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	2.700.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanaman angka	2,42	9.525.000.000	2,43	9.525.000.000	2,44	9.525.000.000	2,44	28.575.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian unit	4	2.225.000.000	4	2.225.000.000	4	2.225.000.000	12	6.675.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.01 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	13	500.000.000	13	500.000.000	13	500.000.000	39	1.500.000.000	DINAS TPHP	

			Pertanian Lainnya	Lainnya laporan											
		3.27.0 3.2.01 .0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	DINAS TPHP		
		3.27.0 3.2.01 .0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DINAS TPHP		
		3.27.0 3.2.01 .0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	DINAS TPHP		
		3.27.0 3.2.01 .0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan unit	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	DINAS TPHP		
		3.27.0 3.2.01 .0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola dokumen	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	DINAS TPHP		

			P2B di Kabupaten/Kota											
		3.27.0 3.2.01 .0017	Penyusunan action plan pengembangan sarana prasarana Kawasan pertanian	Jumlah action plan pengembangan sarana prasarana Kawasan pertanian dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian unit	121	7.300.000.000	121	7.300.000.000	121	7.300.000.000	363	21.900.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02 .0003	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara unit	66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	198	10.200.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02 .0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara unit	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	2.700.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02 .0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi unit	53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	159	9.000.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02 .0003	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT %	<2	100.000.000	<2	100.000.000	<2	100.000.000	<2	300.000.000	DINAS TPHP	

		3.27.0 3.2.02 .0009	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlayannya laporan serangan organisme pengganggu tanaman %		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.0 3.2.02 .0010	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan hektar		150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	300.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.05	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang tertangani hektar1		150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	150.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT %		98	150.000.000	98	150.000.000	98	150.000.000	98	450.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota laporan		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	DINAS TPHP	

	3.27.0 5.2.01 .0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan hektar		150	100.000.00 0	150	100.000.00 0	150	100.000.00 0	150	300.000.00 0	DINAS TPHP	
	3.27.0 5.2.01 .0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang tertangani hektar1		150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	150.000.00 0	DINAS TPHP	
	3.27. 05.2. 01	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya lembaga		97	330.000.0 00	97	330.000.00 0	97	330.000.00 0	291	990.000.0 00.	DINAS TPHP	
	3.27.0 5.2.01 .0001	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penambahan kelembagaan petani yang sesuai dengan peraturan perundangan lembaga		18	330.000.0 00	18	330.000.00 0	18	330.000.00 0	54	990.000.0 00	DINAS TPHP	
	3.27.0 5.2.01 .0002	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian		18	270.000.00 0	18	270.000.00 0	18	270.000.00 0	18	810.000.00 0	DINAS TPHP	

				diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya unit										
		5.27.07	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)	1.134	60.000.000	1.134	60.000.000	1.134	60.000.000	1.134	180.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya lembaga	97	330.000.000	97	330.000.000	97	330.000.000	291	990.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian unit	232	330.000.000	232	330.000.000	232	330.000.000	232	990.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.07.2.01.0001	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya unit	18	170.000.000	18	170.000.000	18	170.000.000	18	510.000.000	DINAS TPHP	
		3.27.07.2.01.0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232	60.000.000	232	60.000.000	232	60.000.000	232	180.000.000	DINAS TPHP	

				unit											
		3.27.0 7.2.01 .0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian dokumen		3	100.000.00 0	3	100.000.00 0	3	100.000.00 0	9	300.000.00 0	DINAS TPHP	

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN

7.1. Rencana Program

Program pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja pembangunan daerah melalui pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Magetan pada kurun waktu 2024-2026.

Penetapan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Produksi komoditas pertanian

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Perubahan Rencana Strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja berikut.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
TAHUN 2024-2026

NO	Aspek/Fokus / Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target RPD				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026		
	Produksi komoditas pertanian :								
1	Padi	Kw		3.976.534	3.538.629	3.582.243	3.635.198	3.635.198	Dinas TPHP
2	Jagung	Kw		1.142.180	1.516.395	1.558.349	1.603.768	1.603.768	Dinas TPHP
3	Jeruk Pameló	Kw		263.098	204.000	270.000	332.500	332.500	Dinas TPHP
4	Tebu	Kw		5.612.250	3.685.000	3.852.500	4.020.000	4.020.000	Dinas TPHP

BAB 8 PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (PERUBAHAN RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun tiga tahunan yang berorientasi produksi, produktifitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Dokumen Perubahan Perubahan Renstra ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dimana sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perubahan Perubahan Renstra merupakan tindak lanjut dari sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah Magetan Tahun 2024-2026;

Kepala Dinas dan Staf karyawan yang berada di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan segala hal yang tertuang didalam Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan.